



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG EKO HARTANTO**
2. Jabatan : **AUDITOR**
3. NHK : **431828**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/45 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/45 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 435 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1997, HIBAH TANPA AKTA Rp. 55.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2005, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000
4. MOTOR, HONDA T4GO2T31LO M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 111.918.999**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.117.918.999

III. HUTANG Rp. 10.500.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.107.418.999

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.